

**INDIKASI BELUM SIAPNYA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN
AIR TANAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN)**

Puji Pratiknyo.

Jurusan Teknik Geologi UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Since implementation of territory autonomy law 1999, on role in decentralization foundation have been formed and composed province territory, regency territory and town teritorry which have an authority to arrange locally citizens needed based on citizens aspirations.

To groundwater management should be based on a groundwater basin region and subsurface water management in an region handled by bupati/walikota. Management of groundwater basin which its spread crossing provinces or districts/towns is handled by governor or bupati/walikota base on agreement bupati/walikota with coordination supported and facilitated of governor.

Kabupaten/kota must prepare human resources to groundwater management appropriate with field will be handled. Unpreparation in human resources to groundwater management will be affected in decreases of groundwater quality.

In Gowa regency, the preparation in human resources to groundwater management is not yet ready, its indicated by no person which master in groundwater science and uncorrected the technically content of groundwater drilling permit letter.

Sari

Sejak diimplementasikannya Undang Undang otonomi daerah Tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusunlah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan air tanah harus berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan pengelolaan air bawah tanah yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh masing-masing gubernur atau bupati/walikota berdasarkan kesepakatan bupati/walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi dari gubernur.

Semestinya daerah kabupaten/kota mempersiapkan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan air tanah sesuai dengan bidang keahlian yang ditanganinya. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan air bawah tanah akan berdampak pada penurunan mutu air tanah.

Di kabupaten Gowa, belum siapnya sumber daya manusia dalam pengelolaan air bawah tanah diindikasikan dengan tidak adanya tenaga ahli di bidang air tanah dan isi Surat Izin Melakukan Pengeboran Air Tanah yang secara teknis tidak tepat.